

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilakukan bangsa Indonesia merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara secara keseluruhan. Pembangunan nasional di laksanakan bersama oleh rakyat dan merupakan pembangunan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional. Dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan bangsa lain. Sebagaimana telah diketahui bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional maka pelaksanaan pembangunan harus adil dan merata diseluruh tanah air, hal ini tidak terlepas adanya peranan pembangunan nasional mencapai keberhasilan pembangunan daerah agar menjadi pembangunan yang benar-benar utuh, untuk itu perlu diusahakan adanya keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik, serta disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah (Sopian & Akhmad, 2022:1).

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari tahun ke tahun kebijakan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) disetiap daerah provinsi, kabupaten dan kota relatif tidak banyak. Artinya sumber utama pendapatan asli

daerah (PAD) Itu juga yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba dari BUMN. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan fiskal (National fiscal policy) pemerintah pusat mengandalkan penerimaan jenis pajak yang “subur” untuk kepentingan nasional (Putu & I Nyoman, 2018:2).

Setelah desentralisasi digulirkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah (pemda) berlomba-lomba menciptakan ”kreativitas baru” untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dimasing-masing daerah. Selama pendapatan asli daerah benar-benar tidak memberatkan atau membebani masyarakat local, investor local, maupun investor asing, tentu tidak masalah. Dan dikatakan bahwa daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat setiap tahun mengindikasikan daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa tergantung dana pusat. Sebaliknya jika pendapatan asli daerah (PAD) justru berdampak terhadap perekonomian daerah yang tidak berkembang atau semakin buruk, maka belum dapat dikatakan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah .pemahaman dimana sebenarnya pergerakan otonomi daerah masih kurang. Mereka berfikir otonomi daerah hanya memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) sebesar-besarnya. Itu persepsi yang salah . Tujuan dan sasaran pemberian otonomi daerah dalam artian wewenang yang luas kepada provinsi kabupaten dan kota adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa mempertimbangkan bahwa ini sangat memberatkan masyarakat local, investor lokal

dan investor asing, justru menghambat perkembangan perekonomian daerah terutama dalam era kompetitif yang berlaku sekarang.

Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran dan Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Selatan 2018-2022

Keadaan Tenaga Kerja	Keadaan Tenaga Kerja				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penduduk yang Bekerja (Orang)	3963870.00	4012611.00	4091383.00	4179708.00	4289.70
Penganggur (Orang)	175087.00	190204.00	238363.00	219199.00	208.26
Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	4138957.00	4202815.00	4329746.00	4179708.00	4497.96
Tingkat Pengangguran (%)	4.23	4.53	5.51	4.98	4.63

Sumber: <https://sumsel.bps.go.id/indicator/6/260/2/keadaan-tenaga-kerja.html>

Berdasarkan Tabel 1.1. terlihat bahwa kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2022. Dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, tingkat partisipasi tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan yang paling tinggi terdapat pada tahun 2022 yaitu sebesar 4497.96 hal ini disebabkan karena adanya peran pemerintah Provinsi dalam hal pengelolaan serta mengawasi segala bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten / Kota mengenai masalah ketenagakerjaan. Penyerapan ketenagakerjaan paling rendah terdapat pada tahun 2018 dan 2021. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 5,51%. Tingginya tingkat pengangguran yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan pandemi COVID-19 (<https://sumsel.antaraneews.com>).

Provinsi yang maju adalah Provinsi yang memiliki tingkat pengangguran yang rendah, dan Kabupaten yang maju adalah Kabupaten yang memiliki tingkat pengangguran yang rendah. Dilihat dari data statistik tahun 2018-2022, rata-rata tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan berada di bawah 6%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki tingkat pengangguran terbuka yang rendah. Rendahnya jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Selatan berdampak pada kemampuan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dalam membayar pajak dan retribusi yang dibebankan oleh Pemerintah Daerah yang pada akhirnya berdampak terhadap PAD Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam membangun perekonomian suatu daerah karena dana ini adalah milik pemerintah daerah itu sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengelola dana tersebut untuk kepentingan pembangunan. Pemerintah daerah pun memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dimana dana tersebut diperoleh dari masyarakat maka masyarakat berhak mendapatkan kelayakan dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di daerah tersebut.

Tabel 1.2.
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2017-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2017	3031633624.30
2018	3528010712.18
2019	3494510853.25
2020	3375100984.84
2021	3865463033.09

Sumber: www.jpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas nilai PAD provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2021. Dimana angka PAD tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 3865463033.09 dan PAD terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 3031633624.30. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan ekonomi provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2017-2021 tidak stabil. Menurut Septian (2021), semakin tinggi jumlah tenaga kerja maka akan meningkatkan produksi yang nantinya akan meningkatkan produk domestik regional bruto. berarti pula meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah untuk membangun program-program pembangunan. Sehingga dengan meningkatnya pendapatan daerah melalui pajak. Salah satu manfaat dari kajian PAD yaitu untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki perekonomian yang bagus (Jolianis, 2012). Apabila PAD provinsi semakin kecil maka menunjukkan perekonomian provinsi tersebut semakin kurang bagus. Menurut beberapa kajian sebelumnya, dua faktor utama yang dinilai

mempengaruhi besar kecilnya PAD secara positif dan signifikan adalah jumlah angkatan kerja dan investasi (Kurniawan *et al.*, 2018).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil judul: “Pengaruh Tingkat pengangguran terbuka dan Penyerapan tenaga kerja Terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah ada pengaruh tingkat pengangguran terbuka dan penyerapan tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan baik secara parsial maupun simultan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui Pengaruh Tingkat pengangguran terbuka dan Penyerapan tenaga kerja Terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan baik secara parsial maupun simultan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berikut ini manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Baturaja tentang Pengaruh Tingkat pengangguran terbuka dan Penyerapan tenaga kerja Terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan .

1.4.2. Manfaat Praktis

Memberikan saran dan masukan yang bermanfaat mengenai pengaruh tingkat pengangguran terbuka, dan penyerapan tenaga kerjaterhadap pendapatan asli daerah (PAD) sehingga dapat mengurangi penyimpangan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).